

GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Junior Hendri Wijaya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jrhendriwijaya@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the governance in the implementation of e-government in Indonesia. The main focus of this research is governance in the implementation of e-government in Indonesia. The method used in this research is qualitative with literature study, with the object in this research is the e-government in Indonesia in terms of governance perspective. This study uses secondary data sources from journal articles, news, books, and related documents. The data analysis technique used in this research is content analysis. The results show that the conditions for the development of e-government in Indonesia have not been maximized, but have the potential to continue to develop in the future. Indonesia's Telecommunication Infrastructure Index has always been the component with the lowest score, while HCI always shows the highest value. Indonesia has fulfilled the support element in the concept of digitizing the public sector, but the capacity and value elements cannot be met. From a governance perspective in the development of e-government in Indonesia, Indonesia's participation is in the type of direct participation, and obstacles to implementing e-government within the governance framework occur due to a lack of public trust in the government, imperfect directions, different understandings of how e-government works, and challenges that must be faced by the government related to changes in the governance system that are adapted to the implementation of e-government. The type of governance in Indonesia in the implementation of e-government is a rigid type of governance, with adaptive capacity of government or governance that has high exploitation, but low exploration.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan *governance* dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perkembangan *e-government* di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. *Telecommunication Infrastructure Index* Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen *support* dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen *capacity* dan *value* tidak dapat dipenuhi. Perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan *e-government* dalam kerangka *governance* terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja *e-government*, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan *e-government*. Jenis *governance* di Indonesia dalam pelaksanaan *e-government* adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah.

Keywords: Governance; E-Government; Indonesia.

Pendahuluan

E-government (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Setiawan, 2017).

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

Secara umum pengertian *electronic government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya.

Menurut Kooiman and Bavinck (2005), pendekatan tata kelola memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan penting antara manajemen, pembuatan kebijakan, dan tata kelola. Perbedaan-perbedaan ini jelas bervariasi menurut budaya dan bahasa. Tata kelola merupakan istilah yang lebih inklusif, diikuti oleh kebijakan, dan terakhir oleh manajemen. Tata kelola mampu melampaui masalah yang ada guna memberikan pertimbangan tren dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Tata kelola juga tidak membatasi diri pada sektor tertentu. Akan tetapi, mampu menanggapi isu sektoral sebagai cerminan keadaan yang lebih umum.

Jika dilihat dari kaca mata administrasi publik dan kebijakan, maka tata kelola pemerintahan didefinisikan sebagai (Rhodes, 2007):

1. Saling ketergantungan antar organisasi. Tata kelola pemerintahan yang lebih luas mencakup aktor non-negara. Mengubah batas negara sama dengan mengubah batas antar sektor publik, dan swasta.
2. Melanjutkan interaksi antar anggota yang disebabkan oleh kebutuhan bertukar sumber daya dan merundingkan tujuan bersama.
3. Interaksi yang berakar pada kepercayaan dan diatur dan dinegosiasikan dan disetujui oleh anggota.
4. Tingkat otonomi yang signifikan bagi sebuah negara. Masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap negara, mereka justru mengatur diri sendiri.

Tata kelola telah didefinisikan untuk merujuk pada struktur dan proses yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, supremasi hukum, stabilitas, kesetaraan dan inklusivitas, pemberdayaan, dan partisipasi berbasis luas. Tata kelola juga mewakili norma, nilai, dan aturan main yang melaluinya urusan publik dikelola secara transparan, partisipatif, inklusif, dan responsif. Oleh karena itu, tata kelola dapat bersifat halus dan mungkin tidak mudah diamati. Dalam arti luas, pemerintahan adalah tentang budaya dan lingkungan kelembagaan di mana warga negara dan pemangku kepentingan berinteraksi di antara mereka sendiri dan berpartisipasi dalam urusan publik. (Ibe.unesco.org, 2015)

Konsep "tata kelola" bukanlah hal baru. Namun, itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, oleh karena itu kita harus fokus dengan benar. Arti sebenarnya dari konsep tersebut tergantung pada tingkat pemerintahan yang sedang kita bicarakan, tujuan yang ingin dicapai dan pendekatan yang diikuti. Konsep tersebut telah ada dalam wacana politik dan akademis untuk waktu yang lama, mengacu dalam arti umum untuk tugas menjalankan

pemerintahan, atau entitas lain yang sesuai dalam hal ini. Dalam hal ini, definisi umum yang diberikan oleh Webster's Third New International Dictionary (1986:982) membantu, hanya menunjukkan bahwa pemerintahan adalah sinonim untuk pemerintah, atau "tindakan atau proses pemerintahan, khususnya pengarahan dan kontrol otoritatif". Penafsiran ini secara khusus berfokus pada efektivitas cabang eksekutif pemerintahan.

Definisi kerja yang digunakan oleh British Council, bagaimanapun, menekankan bahwa "pemerintahan" adalah gagasan yang lebih luas daripada pemerintah (dan dalam hal ini juga terkait konsep seperti negara, pemerintahan yang baik dan rezim), dan selanjutnya menyatakan: "Pemerintahan melibatkan interaksi antara lembaga-lembaga formal dan mereka yang ada dalam masyarakat sipil. Pemerintahan mengacu pada proses di mana elemen-elemen dalam masyarakat menggunakan kekuasaan, otoritas dan pengaruh serta menetapkan kebijakan dan keputusan mengenai kehidupan publik dan peningkatan sosial."

Oleh karena itu, "pemerintahan", tidak hanya mencakup tetapi melampaui makna kolektif dari konsep-konsep terkait seperti negara, pemerintah, rezim, dan pemerintahan yang baik. Banyak elemen dan prinsip yang mendasari "pemerintahan yang baik" telah menjadi bagian integral dari arti "pemerintahan". John Healey dan Mark Robinson (2015) mendefinisikan "pemerintahan yang baik" sebagai berikut: "Ini menyiratkan tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar ditempuh, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas, dan rakyat. pemerintahan yang baik juga menyiratkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Ini tidak selalu mengandaikan penilaian nilai, misalnya, penghormatan yang sehat terhadap kebebasan sipil dan politik, meskipun

pemerintahan yang baik cenderung menjadi prasyarat untuk politik. legitimasi".

Kontribusi Goran Hyden (2004) untuk membawa kejelasan yang lebih besar pada konsep pemerintahan perlu mendapat perhatian khusus. Dia mengangkat pemerintahan ke "konsep payung untuk mendefinisikan pendekatan politik komparatif", sebuah pendekatan yang mengisi kesenjangan analitis yang ditinggalkan oleh orang lain. Dengan menggunakan pendekatan tata kelola, ia menekankan "potensi kreatif politik, terutama dengan kemampuan para pemimpin untuk bangkit di atas struktur biasa yang ada, untuk mengubah aturan main dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam upaya memajukan masyarakat di arah baru dan produktif".

Pandangannya bermuara pada hal berikut:

1. Tata kelola adalah pendekatan konseptual yang, jika dijabarkan sepenuhnya, dapat membingkai analisis komparatif makro-politik.
2. Tata kelola menyangkut pertanyaan "besar" yang bersifat "konstitusional" yang menetapkan aturan perilaku politik.
3. Tata kelola melibatkan intervensi kreatif oleh aktor politik untuk mengubah struktur yang menghambat ekspresi potensi manusia.
4. Pemerintahan adalah konsep rasional, menekankan sifat interaksi antara negara dan aktor sosial, dan di antara aktor sosial itu sendiri.
5. Tata kelola mengacu pada jenis hubungan tertentu di antara aktor politik: yaitu, hubungan yang disetujui secara sosial daripada sewenang-wenang.

Sebagai kesimpulan, jelas bahwa konsep *governance* selama bertahun-tahun mendapatkan momentum dan makna yang lebih luas. Selain sebagai instrumen manajemen urusan publik, atau tolok ukur perkembangan politik, pemerintahan telah menjadi mekanisme yang berguna untuk

meningkatkan legitimasi ranah publik. Ini juga telah menjadi kerangka atau pendekatan analitis untuk politik komparatif.

Metode Penelitian

Metode menjadi jembatan utama penelitian setelah permasalahan dan teori dirangkai. Melalui metode akan diketahui bagaimana cara mendapatkan data dan hasil penelitian yang kemudian dirangkai menjadi tulisan. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015), penelitian adalah sebuah pelacakan terorganisasi, yang bersifat penuh kehati-hatian dan kritis dalam pencarian fakta dalam menentukan sesuatu.

Penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah yang dipergunakan untuk mendapatkan data bagi tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud berdasarkan ciri keilmuan yakni rasional, empiris, dan sistematis. Rasional diartikan sebagai cara yang masuk akal dan terjangkau oleh nalar manusia. Empiris memiliki pengertian sebagai cara yang dapat diamati oleh indera manusia, agar orang lain dapat mengamati dan tahu cara yang dipergunakan. Selanjutnya, sistematis berarti proses yang dipergunakan dalam *research* dilakukan melalui langkah tertentu yang sifatnya logis (Suyitno, 2018).

Melalui pengertian tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah yang jelas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama, yaitu: 1) jenis penelitian, 2) objek penelitian, 3) sumber data, 4) teknik pengumpulan data, 5) teknik analisa data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka. Melfianora (2019), mengatakan bahwa studi pustaka merupakan istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (*literature review*), dan tinjauan teoritis. Data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dari sumber pustaka atau dokumen. Sari and Asmendri (2020), mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan *research* yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data, dengan data-data perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian terdahulu, artikel, catatan, jurnal dan lain-lain. keseluruhan data tersebut harus relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memfokuskan diri untuk melihat perkembangan *e-government* di Indonesia melalui perspektif *governance*, melalui data-data kepustakaan. Kuhlthau (1994), mengatakan bahwa prosedur dalam penelitian kepustakaan terdiri dari:

- a) pemilihan tema
- b) eksplorasi informasi
- c) penentuan arah penelitian
- d) pengumpulan sumber data, dan
- e) penyusunan laporan

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1. Data Ketercapaian Tiga Dimensi Penting *E-government* Indonesia Menurut *E-government Development Index*

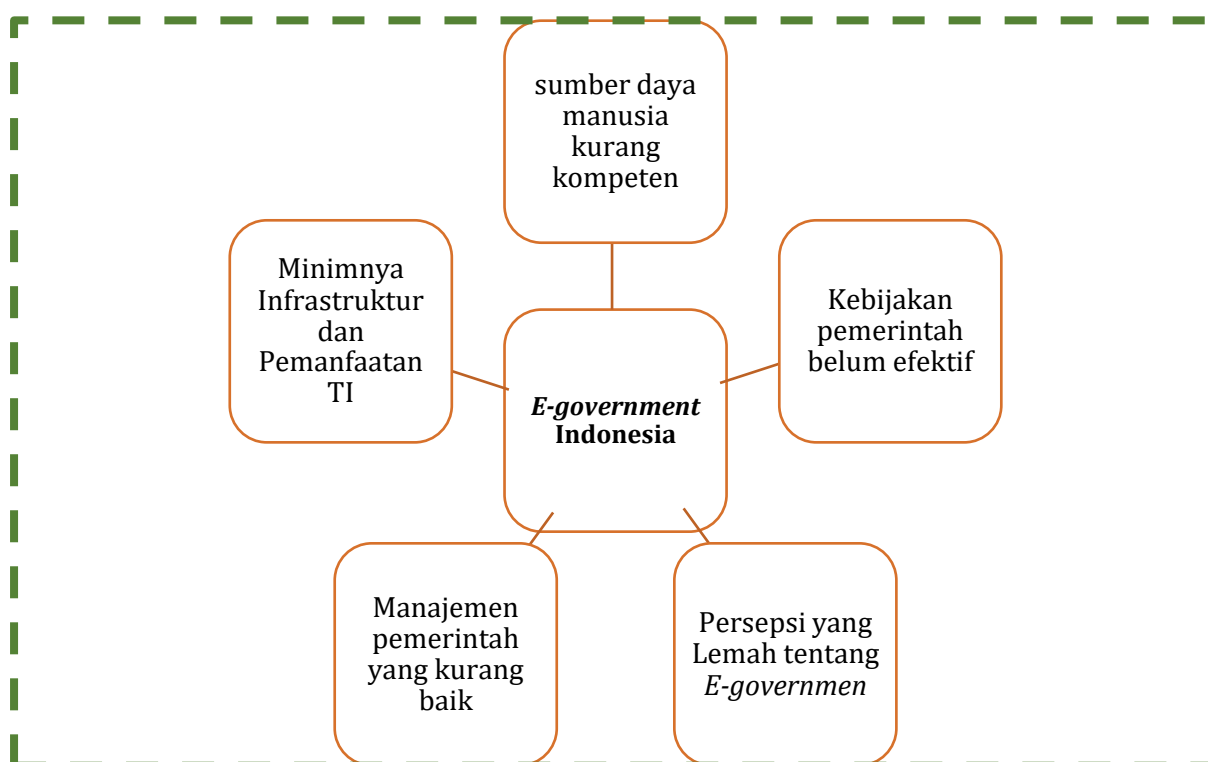
Tiga Dimensi Penting <i>E-Government</i>	Tahun									
	2003	2004	2005	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Online Service Index	0.43231	0.32432	0.29615	0.33444	0.24444	0.49673	0.36220	0.36232	0.56940	0.68240
Telecommunication Infrastructure Index	0.04500	0.04838	0.04944	0.07015	0.11429	0.18966	0.30544	0.30158	0.32220	0.56690
Human Capital Index	0.79000	0.80000	0.80000	0.82992	0.85400	0.79819	0.67860	0.67960	0.68570	0.73420
EDGI	0.4224	0.3909	0.3819	0.4107	0.4026	0.4949	0.4487	0.4478	0.5258	0.6612
Group	MEGDI	MEGDI	MEGDI	MEGDI	MEGDI	MEGDI	MEGDI	MEGDI	HEGDI	HEGDI
Rank	70	85	96	106	109	97	106	116	107	88

Sumber: diolah penulis dari (*publicadministration.un.org*, 2020)

Pada dasarnya tabel 1, keseluruhan permasalahan atau kendala dalam penerapan *e-government* di Indonesia, terdiri atas:

1. Sumber daya manusia yang kurang kompeten
2. Minimnya infrastruktur dan penerapan IT

3. Kebijakan pemerintah yang belum efektif
4. Manajemen pemerintah yang kurang baik
5. Persepsi yang lemah tentang *e-government*.



Gambar 1. *E-government* Indonesia

Pada negara-negara berkembang, banyak lembaga pemerintah yang mengalami hambatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik walaupun sudah memiliki teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni. Para birokrat justru memahami keberhasilan *e-government* hanya ditentukan oleh teknologi, sementara faktor luar banyak yang lebih dominan sebagai faaktor kegagalan, misalnya manajemen organisasi, etika dan budaya kerja (Sudarsono & Lestari, 2018).

Penelitian Musfekar (2018), memperlihatkan bahwa kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan *e-government*, adalah faktor organisasi, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur tidak memperlihatkan pengaruh yang besar. Sementara itu, pada tahun 2013, (Jaya, 2013) mengemukakan bahwa implemetasi *e-government* di Indonesia masih tertinggal jauh, baik dari segi G2C, G2B, ataupun G2G. Menurutnya, layanan G2G belum menjadi dukungan yang kuat bagi G2C dan G2B. Penyebabnya adalah:

- 1) komitmen yang kurang dari para pemangku kepentingan
- 2) belum meratanya ICT
- 3) sumber daya manusia memiliki tingkat kemampuan yang kurang handal dan tercermin dalam budaya organisasi, budaya kerja, dan kepemimpinannya.
- 4) Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penerapan, manfaat ataupun strategi pengembangan belum dapat dilakukan sepenuhnya.
- 5) Pemanfaatan IT sangat minim meskipun layanan portal dimiliki oleh lembaga pemerintahan. *Update* yang dilakukan hanya didasarkan pada informasi-informasi sekunder, seperti surat kabar, internet dan hasil perbandingan opini publik.

Implementasi *e-government* dianggap sama dengan *e-public service*, meskipun keduanya sangat berbeda. Dalam pengadopsian sistem *e-government*, pemerintah tidak serta memiliki fitur *e-public*. Penggunaan *e-government* hanya sampai pada tahap penyampaian informasi melalui website, sementara data dan informasi tidak diperbaharui secara terus-menerus (Aritonang, 2017). Aritonang juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang memberikan pengaruh terhadap implementasi *e-government*, antara lain:

- 1) Budaya kerja organisasi yang masih bersifat konvensional
- 2) Kualitas sumber daya manusia dalam *e-government* yang masih rendah
- 3) Anggaran yang terbatas
- 4) Buruknya pengakuan dari masyarakat.

Pada penelitian (Wirawan, 2020), disebutkan dua poin penting yang berhubungan dengan sistem *e-government* di Indonesia, yaitu:

- 1) secara kuantitas, sistem *e-government* di Indonesia telah meningkat, meskipun dari segi kualitas belum memenuhi. Hal ini dikarenakan belum meratanya implementasi *e-government* di

seluruh wilayah, serta fungsi yang diberikan hanya sebagai penyedia informasi statistik.

- 2) kendala paling dasar dalam penyelenggaraan *e-government* justru berada pada tingkat pemerintah daerah, yaitu:
 - a) inisiatif dan pemaknaan implementasi *e-government* masih sendiri-sendiri.
 - b) Implementasi melalui situs web belum mendapatkan dukungna dari sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, dikarenakan kesiapan peraturan, prosedur dan terbatasnya SDM. Pemerintah banyak yang menempatkan *e-government* hanya untuk membuat situs web pemerintah.

Penelitian Retnowati and Retnowati (2015), disarankan kebijakan umum untuk pemerintah daerah yang akan melaksanakan *e-government*. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Pembangunan *e-government* harus disusun dalam lima tahap dan direncanakan selama satu tahun. Hal ini juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan misalnya RKPD, RENSTRA.
- 2) Dilakukan pengembangan aplikasi pada semua kategori. Pada G2G yang harus ditekankan adalah pengembangan aplikasi pada lingkup internal pemda dan legislatif, yang kemudian diperlebar pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk G2B diprioritaskan pada sistem aplikasi UKM dan BUMN/BUMD, serta RSUD. Untuk G2C difokuskan pada aplikasi *e-government* portal dan kolaborasi serta koordinasi, pun pada sistem pendukung keputusan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas menurut peneliti bermula dari tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana globalisasi mendorong manusia untuk mempergunakan teknologi secara maksimal, tetapi dalam

pelaksanaannya sering kali dilupakan bahwa diperlukan pertimbangan yang lebih matang dalam perkembangannya. Namun, apakah penerapan *e-government* di Indonesia dalam kerangka *governance* terdapat campur tangan ‘kekuasaan’?

Menurut Malpas and Wickham (2015), *pertama* ketidaklengkapan atau keberpihakan dari setiap proyek tata kelola berhubungan dengan objek dan praktik yang diaturnya. *Kedua*, karakter yang tidak lengkap dari setiap pemerintahan itu sendiri selama ia masih tunduk dan berimplikasi dengan sistem pemerintahan lainnya. Keduanya dianggap menunjukkan kecenderungan tata kelola untuk gagal sejauh proyek-proyeknya selalu tunduk pada campur tangan dan praktik pemerintahan lainnya, serta terjadi perlawanan dalam praktik tersebut. Perlawanan dan campur tangan semacam itu bukan merupakan sebuah kebetulan bagi pemerintahan, tetapi merupakan unsur intrinsik yang berada di dalam sistem. Oleh karena itu, kapasitas dalam memerintah selalu bersifat parsial baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap apa yang diperintahnya.

Pendapat Malpas dan Wickham (2015) dapat disimpulkan bahwa tata kelola hanya akan berhasil jika campur tangan pemerintah berkaitan dengan kekuasaan terlalu masuk ke dalam ranah *governance* secara luas. Jika merujuk pada teori tersebut, maka peneliti memiliki pemahaman bahwa campur tangan kekuasaan dalam pemerintah itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, memang dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia membutuhkan usaha yang lebih dalam mendorong perkembangan *e-government*, terutama dari segi infrastruktur telekomunikasi, dan sumber daya yang kompeten.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, peneliti juga meyakini bahwa semuanya terjadi karena

kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna dalam mengenalkan *e-government*, perbedaan pemahaman tentang cara kerja *e-government* antara pemerintah dengan masyarakat, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait tantangan pada perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan *e-government*. Hal ini hampir senada dengan pendapat Chhotray and Stoker (2009), yang menyatakan bahwa kegagalan tata kelola mungkin terjadi karena konflik kepentingan yang tidak bisa terselesaikan, kepercayaan antar agen yang kurang, pengarahan yang kurang kompeten, dan perbedaan rentang waktu antara masyarakat, serta tantangan untuk berkerja pada skala spasial yang berbeda.

Permasalahan pelaksanaan *e-government* yang terjadi dalam rentang waktu 2003 hingga 2020 ini, selalu menjadi kendala ‘klasik’ yang seperti mengakar dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan *governance* yang dilakukannya. Berhubung *governance* selalu berkaitan dengan ‘perbuatan’ pemerintah dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat, sudah sewajarnya pemerintah menetapkan langkah yang lebih strategis, sehingga dapat bersaing dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menguasai *e-government*.

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penulis bahwa permasalahan pelaksanaan *e-government* yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2003 hingga 2020, selalu menjadi kendala ‘klasik’ yang seperti mengakar dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan *governance* yang dilakukannya. Berhubung *governance* selalu berkaitan dengan ‘perbuatan’ pemerintah dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat, sudah sewajarnya pemerintah menetapkan langkah yang lebih strategis, sehingga dapat bersaing dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menguasai *e-government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. (2017). The impact of e-government system on public service quality in Indonesia. *European Scientific Journal*, Query date: 2021-07-19 07:13:55. <https://www.academia.edu/download/55511621/7.pdf>
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance: From Theory to Practice. In V. Chhotray & G. Stoker (Eds.), *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach* (pp. 214–247). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230583344_10
- ibe.unesco.org. (2015, May 26). *Concept of Governance* [Text]. International Bureau of Education. <http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance>
- Jaya, S. (2013). Implementasi Dan Perkembangan E-Government di Indonesia. *Jurnal Informatika Multimedia (JIM)*, 2(1), 37–52.
- Kooiman, J., & Bavinck, M. (2005). The governance perspective. *Fish for Life: Interactive Governance for Fisheries*, 3, 11.
- Kuhlthau, C. C. (1994). *Teaching the Library Research Process*. Rowman & Littlefield.
- Malpas, J., & Wickham, G. (1995). Governance and failure: On the limits of sociology. *The Australian and New Zealand Journal of Sociology*, 31(3), 37–50. <https://doi.org/10.1177/144078339503100304>
- Melfianora, I. (2019). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*. 29.
- Musfikar, R. (2018). KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.22373/cs.v2i1.2746>
- publicadministration.un.org, 2020. EGOVKB | United Nations > Data > Country Information [WWW Document]. URL <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia> (accessed 1.16.22).
- Retnowati, N., & Retnowati, D. (2015). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. *Seminar Nasional Informatika ...*, Query date: 2021-07-19 07:13:55. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/774>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Setiawan, W. (2017). *Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2018). KAJIAN LITERATUR MODEL KONSEPTUAL KEBERHASILAN E-GOVERNMENT. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.981>
- Suyitno. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA*. Akademia Pustaka.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>